

Pendahuluan

Kepemimpinan masih menjadi salah satu topik menarik dalam manajemen saat ini. Pendapat dan pidato mengenai kepemimpinan sering kali diperbincangkan di media massa, baik media elektronik maupun media cetak.

Kepemimpinan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses kepemimpinan melibatkan mempengaruhi orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam situasi tertentu (Solikhin, 2017).

Peran seorang pemimpin sangatlah strategis dan kritis dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kepemimpinan tidak hanya terbatas pada perilaku atau situasi kepemimpinan saja, namun juga karakteristik kepemimpinan yang menarik jika dikaji secara mendalam dari sudut pandang teoritis.

Dalam konteks UUD (UUD 1945), kepemimpinan merupakan upaya mencapai tujuan nasional. Tujuan utama kepemimpinan adalah tercapainya tujuan nasional, yang mencakup komitmen bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum. Mempromosikan kebaikan bersama memerlukan penyediaan

layanan publik yang berkualitas tinggi. Faktor kepemimpinan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencapai kebaikan bersama, dan mencapai tujuan nasional yang diinginkan.

Penerapan kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 63 tentang Penggunaan Lembaga Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk memperkuat manajemen aktif dalam penyampaian layanan publik berkualitas tinggi.

Para manajer, baik di sektor bisnis maupun publik, percaya bahwa kualitas kepemimpinan merupakan faktor kunci keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi pemerintah desa (Sholikin, 2020).

Kepala desa bertanggung jawab melaksanakan fungsi pokok pemerintahan dan menjamin

terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Pemerintah desa, sebagai badan administratif yang paling dekat dengan masyarakat lokal, memainkan peran penting dalam menyediakan layanan publik penting yang dibutuhkan masyarakat lokal. Oleh karena itu, keberhasilan kepemimpinan kepala desa dalam menjamin pelayanan publik yang berkualitas sangat penting bagi kesejahteraan dan pembangunan desa.

Dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat sangatlah penting. Kepala desa juga berperan sebagai sumber daya dan infrastruktur yang mendukung keseluruhan proses pelayanan publik. Oleh karena itu, aspek-aspek tersebut saling menunjang dan tugas kepala desa harus dilaksanakan secara profesional dan kompeten.

Sumber yang diperlukan meliputi sumber daya manusia, termasuk pegawai yang kompeten, berkualitas, dan jujur. Kepala desa menyadari pentingnya tugas pokok dan fungsi kepala desa, dan karena pegawai merupakan aktor utama yang berkontribusi terhadap kemajuan organisasi, maka untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada perlu mengikuti aturan dan membuat mereka

efektif diperlukan Kebijakan kepala desa. Diharapkan dengan kepemimpinan yang kuat dan efektif, pelayanan publik yang diberikan oleh desa akan semakin meningkat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat (Sholikin, 2018).

Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan menurut barang.

Kinerja penyelenggara pelayanan publik dan pelayanan pemerintah mencerminkan kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan seluruh warganya, yang tercermin dari kinerja pegawai di setiap unit pelayanan. Meskipun ada masukan dari para pemimpin desa di desa Kolan, optimalisasi pelayanan publik masih memiliki kelemahan.

Misalnya, kepala desa cenderung mendukung pemimpin lokal, yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tata kelola dan pemberian layanan publik di desa Kollam, dan lemahnya keadilan. Penulis menyatakan bahwa peran kepala desa dalam pengelolaan kantor desa dinilai kurang

penting dan kualitas pelayanan publik masih kurang optimal.

Salah satu ciri model kepemimpinan yang efektif adalah visi yang jelas. Lebih lanjut, kepemimpinan yang karismatik, memotivasi, menginspirasi, dan mampu menjaga hubungan erat dengan bawahan merupakan salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan.

Dalam berbagai situasi, pemimpin desa harus mampu memimpin bawahannya secara efektif dan efisien untuk mencapai produktivitas dan tujuan organisasi.

Oleh karena itu, kepala desa harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan manajemen yang baik dalam pemberian pelayanan publik di Desa Kolam.

Tinjauan Pustaka

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, secara langsung atau tidak langsung, melalui komunikasi, dengan tujuan untuk sepenuhnya memahami, mengakui, dan bersedia mengikuti instruksi pemimpin.

Hal ini berkaitan dengan proses yang mempengaruhi dan mengendalikan

berbagai tugas yang terkait dengan aktivitas anggota kelompok.

Kepemimpinan juga mencakup kemampuan untuk mempengaruhi strategi, tujuan, komitmen, dan loyalitas terhadap suatu misi untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, kepemimpinan mencakup kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dalam mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang merupakan warga negara Republik Indonesia. Persyaratan dan tata cara pemungutan suara ditentukan oleh peraturan daerah yang merupakan contoh peraturan negara.

Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa diangkat menjadi kepala desa. Terpilihnya kepala desa dalam masyarakat hukum berarti badan tersebut dapat menghormati, mengakui, dan mengikuti pedoman hukum adat setempat, sepanjang mematuhi peraturan daerah yang berlaku.

Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bersama, mempunyai kesamaan adat istiadat, dan menjalani kehidupan menurut gagasan dan kebutuhannya masing-masing. Desa mempunyai

wawasan utama yang muncul dari data yang dikumpulkan.

Metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran kepala desa dalam memberikan pelayanan publik di Desa Kolam.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada untuk meningkatkan kebijakan dan praktik kepemimpinan di tingkat desa. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik kepemimpinan di tingkat desa.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai struktur pemerintahan tingkat paling bawah, desa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya. Aparatur desa harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak boleh sekedar formalitas, namun harus bernilai dan membantu mempertahankan penghidupan masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Peran kepemimpinan Kepala Desa Kolam di Kecamatan Percut Sei Tuan sangat penting dalam penyelenggaraan

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, analisis menunjukkan bahwa warga menilai situasi pemerintahan saat ini tidak terlalu mendukung. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam praktik kepemimpinan antara mantan kepala desa dan kepala desa yang baru dilantik. Mengevaluasi dan meningkatkan praktik kepemimpinan merupakan kunci untuk menjamin pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal di Desa Kolam.

Kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin sebelumnya adalah memberikan dukungan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, yang sangat bermanfaat bagi berbagai kalangan, termasuk para lansia dan janda. Namun, seiring dengan pergantian kepemimpinan, pendekatan terhadap dukungan juga berubah. Para pemimpin baru cenderung hanya mendukung generasi muda, dan para lansia serta para janda tidak lagi menerima perhatian yang layak mereka dapatkan (Solikhin, 2017).

Dampak dari kebijakan bantuan yang tidak konsisten ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga desa. Masyarakat desa menilai kepemimpinan saat ini tidak responsif dan tidak

mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan praktik kepemimpinan saat ini.

Penting bagi pemimpin desa untuk memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat agar pelayanan publik dapat berjalan secara adil dan merata serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh warga desa. Peningkatan kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik kepemimpinan yang sedang berlangsung. Penting bagi kami untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, adil dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga desa. Kepemimpinan yang adil dan setara serta menghargai keberagaman masyarakat mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan nasional dan kesejahteraan kolektif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang konkrit dan berkelanjutan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan merata bagi seluruh warga Desa Kollam. Melalui kegiatan perbaikan yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan praktik tata kelola desa dan pelayanan

publik ditingkatkan sehingga memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat dan terciptanya lingkungan yang inklusif dan berkeadilan yang mampu menjawab kebutuhan dan keinginan seluruh warga desa.

Saat memberikan layanan, penting untuk memberikan layanan secara merata di seluruh desa, karena seluruh masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat pedesaan merupakan bagian dari lembaga negara dan memainkan peran yang sama pentingnya dalam penyediaan layanan yang adil. Tidak boleh ada perbedaan pelayanan bagi seluruh masyarakat desa. Namun, jika penyediaan layanan terbatas, prioritas harus diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan layanan, seperti lansia dan mereka yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu (Sholikin, 2019).

Dalam survei yang dilakukan oleh kelompok sekretaris desa Kollam di Kecamatan Parkat Sei Tuan, peserta survei adalah warga desa, khususnya ibu rumah tangga desa. Menurut kelompok penulis, Kollam termasuk dalam kategori desa padat penduduk dan dinilai masih dalam kondisi baik meskipun jarak antar rumah tidak terlalu jauh. Selama penelitian, kelompok peneliti diterima

dengan baik oleh kepala desa, lurah, dan masyarakat desa Kolam. Selain itu, kelompok penulis juga mendapat tanggapan positif dari ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti penelitian.

Setelah mengenal perempuan-perempuan desa Kolam, kelompok peneliti bertemu satu jam setelah makan siang dan berbicara satu per satu serta mencatat nama mereka. Kelompok peneliti kemudian mewawancarai para ibu yang memberikan jawaban serupa. Para ibu mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat desa tidak mencerminkan sikap profesional sehingga bantuan pemerintah tidak terdistribusi secara merata. Masyarakat lanjut usia di Desa Kolam yang rata-rata berusia di atas 40 tahun tidak lagi menerima bantuan seperti dulu pasca pergantian kepala desa.

Setelah mendengarkan tanggapan para ibu, kelompok peneliti menyimpulkan bahwa sikap pemerintah terhadap penyediaan layanan, khususnya dukungan, tidak adil. Wajar jika orang meminta bantuan, apalagi bagi mereka yang sedang berada dalam keadaan keuangan yang sulit, bantuan tersebut sangat bisa membantu mereka untuk bertahan hidup. Meskipun ada aspek positif dari metode yang digunakan

aparat desa dalam menyalurkan bantuan, namun pemberian bantuan ini tidak adil.

Bantuan yang diprioritaskan harus diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan, seperti lansia yang tidak dapat lagi bekerja dan hanya ingin memberi makan anak-anaknya. Meskipun masyarakat awam tentu membutuhkan dukungan ini, kelompok peneliti mengatakan bahwa mereka tetaplah orang-orang yang bersedia berjuang dan memenuhi kebutuhan mereka melalui pekerjaan mereka. Prioritas harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan, seperti lansia yang tidak mampu lagi bekerja dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang memadai.

Sekalipun bantuan diberikan kepada masyarakat umum, tidak menghalangi lansia untuk diprioritaskan dalam memenuhi kebutuhannya. Kelompok kajian menyatakan bahwa aparat desa harus mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan kebutuhan lansia di desa. Mengingat kondisi lansia yang berisiko dan memerlukan perhatian lebih, maka penting bagi aparat desa untuk memberikan dukungan dan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dengan memungkinkan pelayanan publik

Kabupaten Bojonegoro). *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(1), 32-46.

Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1).

Sirimasa, N., Pioh, N., & Kairupan, J. (2018). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Jangailulu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Eksekutif*.

Sumeru, A. (2016). Kedudukan kantor kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4 (1), 47-56.

Sunarso, D. B. (2023). Teori Kepemimpinan.

Thoha, M. (2006). Kepemimpinan dalam manajemen.